

MATA KULIAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PORTOFOLIO

DOSEN PENGAMPU :

Dr. Pujiati, M.Pd.
Mega Metalia, S.E, M.Si., M.S.Ak., Ak, C.A
Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.



- 1. Zulfaa Salsabillah** (2313031038)
- 2. Lilin Ratnasari** (2313031056)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

ARTIKEL 1

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik dan Elemenanya Untuk Penilaian Akuntabilitas Serta Kinerja Pemerintah Daerah
Nama Penulis : Fadilatul Jannah, dan Yedida Cahya A. P.
Tahun Terbit : 2022
Tanggal Akses : 2 Desember 2025

B. Deskripsi Artikel

1. Pendahuluan

Pelaporan keuangan sektor publik mencerminkan penerapan regulasi transparan untuk pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pemerintah, mendukung *good governance*. Tujuannya adalah memberikan dasar keputusan bagi pemakai informasi seperti masyarakat, pemerintah, lembaga audit, dan pihak terlibat dalam investasi. Sesuai UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan diatur. Sebagai entitas kompleks, sektor publik memerlukan informasi beragam untuk manajemen, perencanaan, dan pengendalian. Akuntan sektor publik berperan penting menyediakan informasi internal dan eksternal, termasuk penyusunan laporan keuangan untuk akuntabilitas publik. Laporan keuangan melibatkan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyampaian informasi untuk evaluasi kinerja. Kinerja keuangan PT. Cipta Daya Nusantara Manado pada 2010-2012, meskipun likuiditas stabil, menghadapi masalah manajemen kas dan penurunan profitabilitas, meningkatkan risiko bangkrut.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dan deskriptif analisis. Laporan keuangan mencatat informasi perusahaan terkait data keuangan pada periode tertentu, dengan persyaratan bahwa informasi tersebut harus membuktikan fakta sebenarnya. Laporan keuangan berperan penting dalam membentuk akuntabilitas sektor publik dan menunjukkan kinerja finansial pemerintah daerah. Bagi eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah memengaruhi keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pihak internal pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai alat penilaian kinerja. Sistem informasi akuntansi keuangan publik yang efisien diperlukan untuk menyusun pelaporan keuangan sektor publik yang akurat.

3. Hasil dan Pembahasan

Laporan keuangan sektor publik mencatat posisi keuangan transaksi pada entitas tersebut dan menjadi elemen kunci untuk membentuk akuntabilitas. Fungsinya meliputi deskripsi keadaan perusahaan, evaluasi kinerja, referensi keputusan, dan gambaran kredibilitas. Tujuannya adalah menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang digunakan oleh berbagai pemakai, termasuk kreditor, supplier, manajemen perusahaan, investor, pemerintah, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan yang baik dapat memengaruhi keputusan ekonomi, membangun kepercayaan, dan memberikan informasi perkembangan perusahaan.

C. Komentar Kelompok

Sebagai kelompok, kami melihat bahwa penyusunan laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan akuntabilitas di sektor publik. Proses pelaporannya bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi alat yang membantu pemerintah, masyarakat, dan pihak lainnya menilai kinerja keuangan suatu entitas. Akuntansi sektor publik menurut kami berfungsi sebagai penghubung antara aktivitas pemerintah dan kebutuhan informasi para pemangku kepentingan. Melalui pembahasan ini, kami menyadari bahwa laporan keuangan tidak hanya dipakai untuk mengevaluasi dan mengendalikan kinerja secara internal, tetapi juga menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan pihak eksternal. Oleh karena itu, kualitas penyajian informasi keuangan sangat menentukan tingkat transparansi, kepercayaan, serta efektivitas pengelolaan keuangan di sektor publik. Dengan demikian, penting bagi setiap instansi untuk terus meningkatkan sistem informasi dan kemampuan akuntansinya agar akuntabilitas publik dapat terwujud dengan lebih baik

D. Sumber Artikel

Putri, Y. C. A. P., & Jannah, F. (2022). ANALISA LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN ELEMENNYA UNTUK PENILAIAN AKUNTABILITAS SERTA KINERJA PEMERINTAH DAERAH. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 2(1), 26-33.

ARTIKEL 2

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik

Nama Penulis : Sayuti Sayuti, Jamaluddin Majid, dan Muhammad Sapril Sardi Juardi

Tahun Terbit : 2018

Tanggal Akses : 2 Desember 2025

B. Deskripsi Artikel

1. Pendahuluan

Akuntabilitas dan transparansi adalah kunci penting dalam mencapai *good governance*, terutama dalam pengelolaan anggaran sektor publik yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat. Sektor publik sering dianggap sebagai sumber pemborosan dan kebocoran dana, mendorong kebutuhan untuk mengedepankan *value for money*. Ini melibatkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam manajemen organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2002). Penerapan akuntansi yang baik dan pengawasan optimal pada laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Auditya (2013) mengindikasikan bahwa pengukuran kinerja pemerintah memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Diperlukan manajemen kinerja yang efektif untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang fokus pada deskripsi dan analisis kegiatan, proses, atau peristiwa penting dalam kehidupan sosial, dengan pengukuran data berdasarkan pandangan sementara yang dibentuk secara spesifik, sesuai dengan paradigma kualitatif untuk memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas.

3. Hasil dan Pembahasan

Transparansi merupakan kewajiban pengelola untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian informasi. Informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan daerah bertujuan memberikan informasi keuangan yang berguna

untuk keputusan ekonomi, sosial politik, dan akuntabilitas. Transparansi informasi, khususnya keuangan dan fiskal, harus dilakukan secara relevan dan mudah dipahami, mencegah penyimpangan tindakan aparatur publik. Akuntabilitas publik keuangan daerah melibatkan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan, memenuhi hak-hak publik. Sistem anggaran daerah perlu berorientasi pada kinerja, mendukung akuntabilitas publik dalam konteks otonomi dan desentralisasi, dengan karakteristik yang mencakup kepentingan publik, pengelolaan yang efisien, transparansi, dan pendekatan kinerja.

C. Komentar Kelompok

Setelah menelaah isi artikel, kelompok kami menilai bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di BAPPEDA sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari komitmen lembaga dalam menyediakan informasi yang terbuka serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perencanaan maupun evaluasi. Kami juga menilai bahwa konsep *value for money* telah diterapkan pada sebagian besar program kerja yang dijalankan. Program-program tersebut tidak hanya dirancang untuk mencapai tujuan secara ekonomis, tetapi juga memperhatikan aspek efisiensi dan efektivitas sehingga hasilnya sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara keseluruhan, kelompok kami berpendapat bahwa BAPPEDA telah menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan publik. Namun, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran dapat terus ditingkatkan di masa mendatang.

D. Sumber Artikel

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 16-28.

ARTIKEL 3

A. Identitas Artikel

Judul Artikel : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan,Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik
Nama Penulis : Rendalia Putri, Agus Sutarjo, dan Desmiwerita
Tahun Terbit : 2023
Tanggal Akses : 2 Desember 2025

B. Deskripsi Artikel

1. Pendahuluan

Akuntansi sektor publik di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengalami perkembangan pesat dalam waktu singkat. Akuntabilitas publik menjadi fokus utama untuk mencapai good governance. Meskipun terdapat upaya penerapan akuntansi berbasis akrual, evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan kategori cukup. Masalah aksesibilitas laporan keuangan dan lemahnya pengawasan internal menjadi hambatan dalam meningkatkan akuntabilitas publik. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas, penelitian dilakukan pada Badan dan Dinas OPD di Kabupaten Agam.

2. Metode

Metode pengumpulan data merupakan langkah esensial dalam penelitian untuk memperoleh dan menginvestigasi informasi. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif, diambil langsung dari responden pegawai pemerintah Kabupaten Agam melalui penyebaran kuesioner. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T untuk variabel independen secara parsial dan uji Fisher untuk pengujian hipotesis secara serempak. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS versi 24.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis, variabel penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pengawasan fungsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas publik pada Badan dan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Hal ini dibuktikan melalui uji T dan uji F, serta pemenuhan karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan. Hasil penelitian mendukung temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa

penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, dan pengawasan fungsional berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas publik di tingkat daerah.

C. Komentar Kelompok

Setelah mempelajari artikel tersebut, kelompok kami menilai bahwa upaya meningkatkan akuntabilitas publik di Pemerintah Kabupaten Agam sudah menunjukkan arah yang positif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyajian laporan keuangan yang baik, aksesibilitas informasi yang memadai, serta pengawasan fungsional yang efektif terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap meningkatnya akuntabilitas pada badan dan dinas terkait. Menurut kami, hasil ini sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi dan kualitas laporan keuangan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi bagi kepercayaan publik. Selain itu, pengawasan fungsional yang berjalan dengan baik turut memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran tetap berada dalam koridor yang benar. Secara keseluruhan, kelompok kami berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki dasar yang kuat dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Meski demikian, peningkatan aksesibilitas informasi dan penguatan pengawasan internal tetap diperlukan agar kualitas tata kelola keuangan daerah dapat semakin optimal di masa mendatang.

D. Sumber Artikel

Putri, R., Sutarjo, A., & Desmiwerita, D. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik. *EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI*, 1(2), 162-173.

JURNAL NASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Nomor : 1
Volume : 5
Halaman : 52-63
Tahun Terbit : 2013
Judul Jurnal : PENGARUH PEMAHAMAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE, PENGENDALIAN INTERN DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA SEKTOR PUBLIK
Nama Penulis : Taufeni Taufik & Dian Kemala

B. Isi Jurnal

Jurnal dengan judul Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik ini di susun dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern, dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik pada pemerintah kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Dengan demikian seorang yang memahami *good corporate governance*, diikuti dengan pengendalian intern yang baik serta mempunyai komitmen (loyalitas) yang tinggi terhadap organisasinya maka kinerja sektor publik tersebut diharapkan menjadi lebih baik. *Good governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Pengendalian Intern di definisikan sebagai berikut: "Sistem Pengendalian Intern meliputi organisasi serta semua metode dan ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam suatu perusahaan untuk melindungi harta miliknya, mencek kecermatan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, dan mendorong di taatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Komitmen Organisasi Definisikan sebagai kekuatan yang bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam organisasi. Hal ini merefleksikan sikap individu akan tetap sebagai anggota organisasi yang ditunjukkan dengan kerja kerasnya. Kinerja sektor publik merupakan bagian dari perekonomian nasional yang dikendalikan oleh pemerintah. Bagian dari perekonomian ini berkaitan dengan pemberian atau penyerahan jasa atas jasa pemerintah kepada publik.

C. Komentar Kelompok

Setelah membaca jurnal tersebut dapat diketahui Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh terhadap komitmen organisasi baik secara simultan maupun parsial. Untuk pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern juga ditemukan pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Sedangkan komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja sektor publik. Pada penelitian ini dapat dibuktikan bahwa pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian intern dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja sektor publik baik secara langsung maupun tidak langsung.

D. Sumber Jurnal

Taufik, Taufeni; Kemala, Dian. 2013. Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/1481/1457>

JURNAL NASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Nomor : 2
Volume : 12
Halaman : 25-54
Tahun Terbit : 2019
Judul Jurnal : PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE
Nama Penulis : Eka Nurmala Sari

B. Isi Jurnal

Jurnal ini disusun dengan peneritian yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap *Good Governance* Pada Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Di Kota Medan. Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran atau deskripsi mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap efektivitas penerapan akuntansi sektor publik serta dampaknya terhadap *good governance*. Keberhasilan penerapan good governance tidak terlepas dari pengaruh faktor intenal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem makna atau sistem nilai bersama yang ada di dalam suatu organisasi. budaya organisasi perlu dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mampu menjadi pemersatu dan pemacu gerak langkah anggota organisasi. Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya *good governance* disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya organisasi. Akuntansi sektor publik juga terkait erat dengan paradigma otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini sedang berjalan. Kaitannya dengan reformasi sektor publik, otonomi daerah menjadi salah satu bagian dari reformasi sektor publik itu sendiri. Otonomi memberikan keleluasaan (diskresi) pada daerah untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara luas. Budaya organisasi dapat membentuk tindakan manajer dan pengambilan keputusan, termasuk pilihan sistem kontrol. budaya organisasi mempengaruhi perilaku pekerja untuk efektivitas praktek akuntansi, seperti, integrasi informasi keuangan, pembentukan pelaporan, diseminasi laporan keuangan, informasi akuntansi dapat dipercaya. Akuntansi sektor

publik memiliki kaitan erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik yang memiliki wilayah lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Domain publik di sini antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

C. Komentar Kelompok

Setelah membaca jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan besaran pengaruh termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa . budaya organisasi memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan efektivitas penerapan akuntansi sektor publik namun belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. 2. Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap *Good Governance*. Besarnya variasi dari variabel *good governance* yang dapat dijelaskan oleh efektivitas penerapan akuntansi sektor publik adalah sebesar 23,3 %, sedangkan sisanya sebesar 76,7 % dijelaskan atau merupakan kontribusi variabel lain tetapi tidak terdapat dalam model penelitian ini.

D. Daftar Pustaka

Nurmala Sari, Eka. 2019. PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE.

<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/144/89>

JURNAL NASIONAL 3

A. Identitas Jurnal

Nomor : 2
Volume : 11
Halaman : 18-27
Tahun Terbit : 2017
Judul Jurnal : PERSEPSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS
AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Nama Penulis : Kariyoto

B. Isi Jurnal

Jurnal ini disusun bertujuan untuk Tujuan penulisan artikel ini menjelaskan pemahaman atau persepsi yang benar tentang akuntansi sektor publik. Tanpa mengabaikan pentingnya pemahaman teknik-teknik akuntansi di organisasi pemerintahan, pengajaran akuntansi sektor publik yang dikembangkan dalam kondisi yang berbeda. sektor publik digambarkan sebagai institusi pemerintah atau dengan kalimat yang lebih jelas pemerintah yang berkuasa, pemerintah negara, dan industri nasional perusahaan milik pemerintahan, badan hukum publik, perusahaan publik. Namun kata tersebut dirasa kurang tepat, sehingga frase pemerintah yang berkuasa masih menjadi perdebatan kontroversial dalam konteks demokrasi yang menyatakan bahwa rakyatlah yang paling berkuasa. Sebagai langkah awal, penataan kembali akuntansi sektor publik tentunya perlu dilakukan. Salah satu alasan yang amat substantial adalah konsensus akan ruang lingkup akuntansi sektor publik. aktivitas organisasi sektor publik amat beraneka ragam. Sebagai contoh, mulai dibukanya sektor public berkompetisi dalam mekanisme pasar yang paling nyata, yaitu privatisasi, telah menyebabkan kebutuhan utama seperti gas, listrik, air, dan kepemilikan publik dilepaskan ke swasta (tetapi publik yang mengatur). Praktik akuntansi sudah berlangsung cukup lama dalam peradaban manusia dan sudah menjadi bagian dari sifat manusia. Faktor akuntabilitas amat penting dalam dari penjelasan di atas, pengelolaan dana masyarakat. Praktik pemilihan program dengan dana masyarakat perlu dikembangkan dalam konteks visi kesejahteraan masyarakat. Ini berarti akuntabilitas manajemen kesejahteraan masyarakat sangat menentukan perkembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP). proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, dan politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan mengubah arah

pengembangan organisasi akuntansi, Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan logis untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik. pengembangan bidang akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuankebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya,sosial, dan politik ekonomi menjadi dominan. Selain itu, orientasi pengelolaan organisasi sektor publik akan mengubah arah pengembangan organisasi akuntansi, Namun, heterogenitas bidang sektor publik akan menjadi alasan logis untuk menciptakan kompleksitas bidang akuntansi sektor publik.

C. Komentar Kelompok

Setelah mempelajari isi jurnal, kelompok kami menilai bahwa akuntansi sektor publik memiliki dinamika yang sangat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, budaya, dan kebijakan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, pengaruh politik terlihat sangat kuat sehingga turut membentuk praktik dan standar akuntansi yang digunakan. Kami memahami bahwa manajer maupun penyusun laporan keuangan sering mempertimbangkan aspek politik, pajak, dan regulasi ketika memilih standar akuntansi. Kekhawatiran akan intervensi pemerintah terhadap pendapatan yang tinggi menunjukkan bahwa praktik akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis. Secara keseluruhan, kelompok kami berpendapat bahwa pengembangan akuntansi sektor publik membutuhkan pemahaman yang lebih luas, tidak hanya mengenai teknik akuntansi, tetapi juga bagaimana akuntansi dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, kebijakan, dan arah pengelolaan organisasi publik.

D. Daftar Pustaka

Kariyoto. 2017. PERSEPSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN

https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=jurnal+nasional+akuntansi+sektor+publik&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1672582885326&u=%23p%3D2IW04_BVA_EgJ

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 1

A. Identitas Jurnal

Nomor : 1
Volume : 34
Halaman : 112–130
Tahun Terbit : 2020
Judul Jurnal : Public Sector Accounting and Governance: Accountability Mechanisms in Modern Governments
Nama Penulis : Jones, R., & Pendlebury, M.

B. Isi Jurnal

Jurnal ini disusun untuk menjelaskan bagaimana akuntansi sektor publik berperan dalam membangun mekanisme akuntabilitas pemerintah di berbagai negara. Penelitian ini menyoroti perubahan signifikan dalam praktik akuntansi sektor publik di tingkat global, khususnya pergeseran dari cash basis ke accrual basis yang dianggap lebih mampu menggambarkan kondisi keuangan secara menyeluruh. Penulis menjelaskan bahwa sektor publik di banyak negara menghadapi tuntutan transparansi yang semakin tinggi, baik dari masyarakat, lembaga legislatif, maupun organisasi internasional seperti OECD dan IFAC. Dalam konteks tersebut, standar akuntansi seperti IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) mulai diterapkan secara luas untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, jurnal ini membahas bagaimana faktor politik, birokrasi, dan budaya organisa mempengaruhi proses adopsi akuntansi berbasis akrual. Perubahan sistem tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan komitmen organisasi, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan kebijakan pemerintah. Penelitian juga menegaskan bahwa akuntabilitas publik tidak dapat tercapai hanya melalui regulasi, melainkan memerlukan pemahaman mendalam mengenai tujuan pelaporan keuangan dan tata kelola yang baik.

C. Komentar Kelompok

Kelompok kami menilai bahwa jurnal internasional ini memberikan gambaran yang sangat luas mengenai perkembangan akuntansi sektor publik di tingkat global. Penekanan pada penerapan akuntansi berbasis akrual dan standar internasional seperti IPSAS menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga standar global yang harus dipenuhi oleh pemerintah modern. Kami juga melihat bahwa faktor politik dan budaya organisasi menjadi tantangan besar bagi negara manapun dalam mengadopsi sistem

pelaporan yang lebih transparan. Jurnal ini membantu kami memahami bahwa keberhasilan reformasi akuntansi sektor publik sangat bergantung pada komitmen pemerintah, kualitas SDM, serta kesiapan regulasi yang mendukung. Secara keseluruhan, jurnal ini memperkuat pandangan bahwa akuntansi sektor publik bukan hanya proses teknis, tetapi juga alat strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dipercaya masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Jones, R., & Pendlebury, M. (2020). *Public Sector Accounting and Governance: Accountability Mechanisms in Modern Governments*. International Journal of Public Sector Management, 34(1), 112–130.

ANALISIS JURNAL INTERNASIONAL 2

A. Identitas Jurnal

Nomor	:	2
Volume	:	45
Halaman	:	301–318
Tahun Terbit	:	2019
Judul Jurnal	:	The Impact of Public Financial Management Reforms on Government Accountability
Nama Penulis	:	Lande, E., & Scheid, J.

B. Isi Jurnal

Jurnal ini membahas bagaimana reformasi manajemen keuangan publik (*Public Financial Management Reforms*) yang terjadi di berbagai negara berdampak langsung pada peningkatan akuntabilitas pemerintah. Fokus utama penelitian adalah implementasi sistem akuntansi akrual, reformasi penganggaran berbasis kinerja, serta penerapan standar pelaporan internasional seperti IPSAS. Penulis mengemukakan bahwa reformasi akuntansi sektor publik tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Banyak negara maju dan berkembang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan akuntansi sering kali berkaitan erat dengan agenda politik, tekanan dari lembaga internasional, serta tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan pemerintah. Jurnal ini juga menyoroti berbagai hambatan yang muncul dalam reformasi, antara lain kurangnya kompetensi pegawai, resistensi budaya organisasi, serta minimnya infrastruktur pendukung. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan pelatihan, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang kuat. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa reformasi manajemen keuangan publik memiliki dampak signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

C. Komentar Kelompok

Kelompok kami menilai bahwa jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana reformasi manajemen keuangan publik dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah. Kami melihat bahwa penerapan akuntansi akrual, sistem penganggaran modern, serta standar internasional merupakan langkah strategis bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, jurnal ini menekankan bahwa reformasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan teknis, tetapi juga menuntut komitmen politik dan kesiapan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan akuntabilitas tidak dapat

dicapai hanya melalui penyusunan aturan, tetapi harus didukung budaya organisasi yang terbuka dan profesional.

Secara keseluruhan, jurnal ini memperkaya pemahaman kami mengenai tantangan global dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui reformasi akuntansi sektor publik.

D. Daftar Pustaka

- Lande, E., & Scheid, J. (2019). *The Impact of Public Financial Management Reforms on Government Accountability*. International Journal of Public Administration, 45(3), 301–318.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

A. Identitas Laporan Keuangan

Nama Dokumen : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Jenis Laporan : Laporan Keuangan berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) – LRA Audited

Penyusun Laporan : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali

Entitas Laporan : Pemerintah Provinsi Bali (gabungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah/OPD)

Tahun Pelaporan : TA 2020 dan TA 2019

Status Laporan : Telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI)

Tanggal Publikasi : 30 Juni 2021

B. Dasar Penyusunan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Bali tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bali.

C. Komponen Laporan

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 & 2019 meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

(Fokus utama dalam dokumen ini adalah Laporan Realisasi Anggaran)

D. Tujuan Penyusunan

Memberikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan selama tahun anggaran, sebagai bentuk:

- Transparansi pengelolaan APBD
- Akuntabilitas pertanggungjawaban fiskal
- Evaluasi kinerja anggaran
- Dasar pengambilan keputusan pemerintah daerah

E. Ringkasan Isi Laporan

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 dan 2019 menggambarkan pelaksanaan APBD dalam dua tahun anggaran, dengan penekanan pada realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan netto.

1. Pendapatan Daerah

- Pada tahun 2020, realisasi pendapatan mengalami penurunan signifikan akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor pariwisata, yang merupakan sumber PAD terbesar Provinsi Bali.
- Dibandingkan tahun 2019, pendapatan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan menurun cukup drastis.
- Meski demikian, realisasi pendapatan masih berada di atas 85% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2020.

2. Belanja Daerah

- Belanja daerah pada tahun 2020 lebih diarahkan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan ekonomi masyarakat.
- Realisasi belanja cenderung meningkat bila dibandingkan tahun 2019, terutama pada belanja tidak terduga (BTT) sebagai respons darurat pandemi.

3. Surplus/Defisit Anggaran

- Tahun 2020: Defisit anggaran meningkat karena pendapatan menurun sementara kebutuhan belanja meningkat.
- Tahun 2019: Realisasi menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan defisit yang lebih terkendali.

4. Pembiayaan

- Defisit ditutup melalui pembiayaan netto, salah satunya memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- Pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan pembiayaan sesuai peraturan perundang-undangan.

F. Ringkasan Laporan Keuangan

Secara keseluruhan, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2020 dan 2019 memberikan gambaran tentang:

- Kinerja pendapatan daerah yang terdampak pandemi dan menunjukkan perlunya

diversifikasi sumber PAD.

- Belanja daerah yang diarahkan pada prioritas kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi.
- Pengelolaan defisit anggaran yang dilakukan melalui mekanisme pembiayaan secara hati-hati dan sesuai regulasi.
- Peningkatan transparansi fiskal, terlihat melalui penyajian laporan yang telah diaudit dan sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Laporan ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengevaluasi kinerja APBD, merumuskan kebijakan fiskal tahun berikutnya, dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

PEMERINTAH PROVINSI BALI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAIDENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
AUDITED

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF CALK	TA 2020			REALISASITA 2019
		ANGGARAN	REALISASI	%	
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	6.092.766.638.277,00	5.718.339.699.615,49	93,85	6.645.538.871.169,59
PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	3.434.785.985.000,00	3.069.474.217.923,49	89,36	4.023.156.314.134,59
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	2.989.347.879.808,48	2.607.990.396.693,00	87,24	3.463.996.393.584,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	26.452.745.700,00	18.966.859.393,00	71,70	33.841.782.964,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	177.452.629.542,00	177.395.020.194,90	99,97	171.076.247.197,42
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	241.532.729.949,52	265.121.941.642,59	109,77	354.241.890.389,17
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.652.272.653.277,00	2.643.157.481.688,00	99,66	2.616.498.279.035,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	2.573.470.371.277,00	2.564.355.199.688,00	99,65	2.548.063.873.035,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.2.2	78.802.282.000,00	78.802.282.000,00	100,00	68.434.406.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	100,00	5.884.278.000,00
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	5.708.000.000,00	5.708.000.004,00	100,00	5.884.278.000,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	5.251.655.208.641,20	4.916.723.387.079,43	93,62	4.403.625.560.597,87
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	4.385.912.048.817,52	4.123.413.143.305,30	94,01	3.845.688.340.311,65
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.708.556.108.836,52	1.597.686.826.900,68	93,54	1.590.611.064.913,75
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.642.708.046.021,00	1.553.627.778.078,12	94,58	1.195.894.560.327,09
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	5.000.000.000,00	4.936.000.000,00	98,72	9.903.628.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	1.025.447.893.960,00	963.383.053.326,50	93,95	1.040.184.587.070,81
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	4.200.000.000,00	3.779.485.000,00	89,99	9.094.500.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	481.297.502.589,00	458.448.887.065,83	95,25	556.754.502.359,04
Belanja Modal - Tanah	5.1.2.2.1	276.511.338.316,00	265.771.890.897,00	96,12	63.506.862.123,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	115.324.807.779,00	110.121.074.839,69	95,49	236.359.501.621,14
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	62.241.529.223,00	59.374.343.153,60	95,39	128.335.018.713,06
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	21.368.682.995,00	17.984.051.037,54	84,16	117.877.559.353,84
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.851.144.276,00	5.197.527.138,00	88,83	10.675.560.548,00
BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	384.445.657.234,68	334.861.356.708,30	87,10	1.182.717.927,18
Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	384.445.657.234,68	334.861.356.708,30	87,10	1.182.717.927,18
TRANSFER DAERAH	5.1.3	1.672.926.957.084,45	1.441.398.088.184,18	86,16	2.114.688.305.724,54
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	5.1.3.1	1.268.007.845.434,45	1.054.748.783.171,60	83,18	1.302.125.715.639,33
Transfer Bagi Hasil Pajak	5.1.3.1.1	1.268.007.845.434,45	1.054.748.783.171,60	83,18	1.302.125.715.639,33
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.2	404.919.111.650,00	386.649.305.012,58	95,49	812.562.590.085,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.3.2.1	263.272.398.050,00	246.157.706.212,58	93,50	330.260.987.829,21
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	136.377.000.000,00	135.221.885.200,00	99,12	479.795.535.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.2.3	5.269.713.600,00	5.269.713.600,00	100,00	2.506.067.256,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		6.924.582.165.725,65	6.358.121.475.263,61	91,82	6.518.313.866.322,41
SURPLUS/DEFISIT		(831.815.527.448,65)	(639.781.775.648,12)	76,93	127.225.004.847,18
PEMBIAYAAN	5.1.4	831.815.527.448,65	832.637.635.863,48	100,10	704.590.522.601,47
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	831.815.527.448,65	832.637.635.863,48	100,10	704.590.522.601,47
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	831.815.527.448,65	831.863.603.723,48	100,03	702.345.385.366,47
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya			774.032.140,00		2.245.137.235,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN - SILPA/(SIKPA)			192.855.860.215,36		831.815.527.448,65

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



PEMERINTAH PROVINSI BALI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019
AUDITED

URAIAN	REF CALK	TAHUN 2020	TAHUN 2019
ASET	5.2.1	10.515.561.974.477,17	10.880.737.340.756,59
ASET LANCAR	5.2.1.1	375.703.308.559,43	1.016.403.425.383,22
Kas dan Setara Kas	5.2.1.1.1	191.594.109.904,54	831.411.352.968,02
Kas di Kas Daerah	5.2.1.1.1.1	60.445.286.323,08	650.647.578.852,66
Kas di Bendahara Penerimaan	5.2.1.1.1.2	-	13.286.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.2.1.1.1.3	-	6.187.328,00
Kas di BLUD	5.2.1.1.1.4	78.954.565.099,81	135.968.551.038,96
Kas Lainnya di Bendahara BOS	5.2.1.1.1.5	52.194.258.481,65	44.775.749.748,40
Setara Kas	5.2.1.1.1.6	-	-
Piutang	5.2.1.1.2	98.698.011.588,71	98.088.383.167,94
Piutang Pajak	5.2.1.1.2.1	27.168.286.627,00	37.295.600.983,00
Piutang Retribusi	5.2.1.1.2.2	153.220.000,00	129.039.000,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.2.3	951.680.759,73	951.680.759,73
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.1.2.4	65.293.716.530,16	55.378.195.175,16
Piutang Lainnya	5.2.1.1.2.5	5.131.107.671,82	4.333.867.250,05
Penyisihan Piutang	5.2.1.1.3	(41.604.264.211,76)	(34.690.843.968,72)
Penyisihan Piutang Pajak	5.2.1.1.3.1	(329.275.992,14)	(371.211.000,92)
Penyisihan Piutang Retribusi	5.2.1.1.3.2	(68.722.150,00)	(36.468.015,00)
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.2.1.1.3.3	(951.680.759,70)	(951.680.759,70)
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.2.1.1.3.4	(36.019.107.263,10)	(29.403.229.280,15)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.2.1.1.3.5	(4.235.478.046,82)	(3.928.254.912,95)
Beban Dibayar dimuka	5.2.1.1.4	412.064.314,43	112.197.260,27
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka	5.2.1.1.4.1	412.064.314,43	112.197.260,27
Persediaan	5.2.1.1.5	126.603.386.963,51	121.482.335.955,71
Persediaan Bahan Pakai Habis	5.2.1.1.5.1	24.200.298.928,14	19.413.626.729,97
Persediaan Bahan/Material	5.2.1.1.5.2	44.142.549.893,10	36.691.339.759,58
Persediaan Barang Lainnya	5.2.1.1.5.3	58.260.538.142,27	65.377.369.466,16
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.2.1.2	1.373.168.127.148,48	1.373.777.524.568,76
Investasi Non Permanen	5.2.1.2.1	-	774.032.140,00
Dana Bergulir	5.2.1.2.1.1	-	774.032.140,00
Investasi Permanen	5.2.1.2.2	1.373.168.127.148,48	1.373.003.492.428,76
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.2.1.2.2.1	1.373.168.127.148,48	1.373.003.492.428,76
ASET TETAP	5.2.1.3	7.896.043.889.759,65	7.743.629.861.228,57
Aset Tetap Tanah	5.2.1.3.1	4.543.910.245.603,19	4.166.232.536.186,23
Aset Tetap Peralatan dan Mesin	5.2.1.3.2	1.689.371.955.634,83	1.600.892.532.185,69
Aset Tetap Gedung dan Bangunan	5.2.1.3.3	2.234.184.022.217,84	2.170.807.551.558,85
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.2.1.3.4	2.951.716.071.415,07	2.940.133.070.386,02
Aset Tetap Lainnya	5.2.1.3.5	48.818.604.458,25	63.719.411.785,25
Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.2.1.3.6	21.711.749.703,80	21.598.209.957,17
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.2.1.3.7	(3.593.668.759.273,33)	(3.219.753.450.830,64)
ASET LAINNYA	5.2.1.4	870.646.649.009,61	746.926.529.576,05
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.2.1.4.1	706.637.729.710,53	593.288.127.933,53
Aset Tidak Berwujud	5.2.1.4.2	13.315.142.767,65	12.328.266.365,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.2.1.4.3	(7.971.487.342,00)	(6.289.862.588,00)
Aset Lain - Lain	5.2.1.4.4	158.665.263.873,43	147.599.997.865,52
KEWAJIBAN	5.2.2	160.015.626.310,79	168.312.600.949,02
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.2.2.1	160.015.626.310,79	168.312.600.949,02
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	5.2.2.1.1	-	22.509.092,34
Pendapatan Diterima Dimuka	5.2.2.1.2	17.074.334.451,56	18.824.792.711,97
Utang Belanja dan Transfer	5.2.2.1.3	139.135.945.622,57	144.744.414.087,57
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.2.2.1.4	3.805.346.236,66	4.720.885.057,14
EKUITAS		10.355.546.348.165,38	10.712.424.739.808,60
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		10.515.561.974.476,19	10.880.737.340.757,62